

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Sulawesi Utara Tahun 2004 - 2022

Elsa Novri Regina¹ Joko Suharianto² Intan Febyanti³ Syaila Azzahraini Siregar⁴
Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara,
Indonesia^{1,2,3,4}

Email: elsargn29@gmail.com¹ Djoko@unimed.ac.id² intanfebyanti3@gmail.com³
Syailazahra115@gmail.com⁴

Abstrak

IPM (Indeks Pembangunan Manusia) ialah sebuah indikator dalam mengukur tingkat keberhasilan peningkatan kualitas hidup manusia serta menetapkan ranking/tingkat pembangunan sebuah daerah. Peningkatan SDM diartikan juga sebagai peningkatan kemampuan dasar penduduk, oleh karena itu meningkatkan kesempatan untuk bisa berpartisipasi dalam proses pembangunan manusia yang mana di dalamnya membutuhkan beberapa indeks dasar seperti pengeluaran, pendidikan, serta kesehatan pengalokasian pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum dalam mensukseskan pembangunan manusia dalam urusan infrastruktur, kesehatan, maupun pendidikan menjadi salah satu peran penting dalam upaya peningkatan pembangunan manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pendapatan asli daerah dan Dana alokasi Umum terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data PAD, DAU dan IPM tahun 2004 – 2022. Jenis data yang digunakan data sekunder yang diambil dari Badan Pusat Statistika (BPS) dan penelitian ini di uji menggunakan model ECM.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Indeks Pembangunan Manusia



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

IPM di Indonesia cenderung mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2015, status pembangunan manusia di Indonesia masih tergolong “sedang”, sama dengan status pada tahun sebelumnya. Namun, pada tahun 2016 level meningkat dari “sedang” menjadi level “tinggi” yang ditandai IPM tumbuh sebesar 0,91 persen dibandingkan tahun 2015. Pada periode 2015-2019, IPM Indonesia rata rata meningkat sebesar 0,87 persen pertahun (Badan Pusat Statistik, 2017). Adanya pandemi Covid-19 yang masuk ke Indonesia pada tahun 2020 tentu memengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia yang pertumbuhannya cenderung mengalami perlambatan. Pada tahun 2020 IPM Indonesia sebesar 71,94 hanya mengalami peningkatan pertumbuhan sebesar 0,2 poin (0,3 persen) dari tahun 2019. Perlambatan pertumbuhan IPM tahun 2020 sangat dipengaruhi oleh salah satu dimensi yang mengukurnya. Terdapat kondisi tiga dimensi yang mengukur nilai IPM di Indonesia yaitu dimensi umur panjang dan hidup sehat, dimensi pengetahuan, dan dimensi standar hidup layak. Indeks pembangunan manusia yang setiap tahunnya terus meningkat. Indeks Pembangunan manusia terdiri dari tiga indikator yaitu Pendidikan, Kesehatan dan pendapatan perkapita. Pendidikan salah satu yang dapat meningkatkan kemampuan manusia dalam penyerapan teknologi dan pengembangan kapasitas untuk mewujudkan pembangunan ekonomi. Menurut publikasi Badan Pusat Statistik dalam hal rata-rata lama sekolah, rumah tangga miskin cenderung lebih rendah rata-rata lama sekolahnya dibandingkan dengan rumah tangga tidak miskin. Pendidikan merupakan suatu sarana untuk meningkatkan

kemampuan sumber daya manusia. Tingkat pendidikan berperan dalam mempengaruhi angka kemiskinan. Orang yang berpendidikan lebih tinggi biasanya akan mempunyai peluang yang lebih rendah untuk menjadi miskin. Tujuan pembangunan kesehatan adalah untuk mencapai kemampuan hidup sehat bagi seluruh rakyat agar bisa meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara optimal. Kesehatan merupakan salah satu syarat meningkatkan produktivitas, orang yang sehat bisa beraktivitas dengan leluasa termasuk dalam bekerja atau mencapai pendidikan. Demikian juga dengan pendapatan dalam indikator indeks pembangunan manusia berperan penting dalam menunjang pendidikan dan kesehatan, karena pendapatan yang tinggi dapat menunjang kedua indikator tersebut. Ketiga indikator indeks pembangunan manusia saling berhubungan dan menunjang masing masing indikator.

Ketersediaan sarana dan prasarana sebagai penunjang peningkatan indeks pembangunan manusia di Sulawesi Utara jelas dapat dilihat dari semakin membaiknya angka IPM setiap tahunnya. Ketersediaan sekolah dan tenaga pengajar untuk menunjang Pendidikan. Perbaikan derajat kesehatan masyarakat juga dibarengi pula dengan ketersediaan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit umum (RSU) dan Pusat Kesehatan masyarakat (Puskesmas). Ketersediaan lapangan pekerjaan juga merupakan salah satu hal yang menunjang pendapatan masyarakat yang merupakan indikator IPM. Selain itu juga yang menjadi pendukung peningkatan IPM adalah ketersediaan bantuan pendidikan seperti beasiswa untuk pendidikan dan bantuan untuk kesehatan sangat menunjang Peningkatan Indeks pembangunan manusia di Sulawesi Utara.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)/Human Development Index (HDI) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara di seluruh dunia. Indeks pembangunan manusia digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. Indeks pembangunan manusia diperkenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR) (BPS, 2020). Menurut Todaro (2006:187) pembangunan manusia ada tiga komponen universal sebagai tujuan utama meliputi: (1) Kecukupan, yaitu merupakan kebutuhan dasar manusia secara fisik. Kebutuhan dasar adalah kebutuhan yang apabila tidak dipenuhi akan menghentikan kehidupan seseorang, meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan dan keamanan. Jika satu saja tidak terpenuhi akan menyebabkan keterbelakangan absolut. (2) Jati diri, yaitu merupakan komponen dari kehidupan yang serba lebih baik adalah adanya dorongan dari diri sendiri untuk maju, untuk menghargai diri sendiri, untuk merasa diri pantas dan layak mengejar sesuatu, dan seterusnya. Semuanya itu terangkum dalam self esteem (jati diri). (3) Kebebasan dari Sikap Menghamba, yaitu merupakan kemampuan untuk memiliki nilai universal yang tercantum dalam pembangunan manusia adalah kemerdekaan manusia.

Tahun	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Tahun	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
2004	73,4	2014	69,96
2005	74,2	2015	70,39
2006	74,4	2016	71,05
2007	72,00	2017	71,66
2008	72,1	2018	72,20
2009	72,5	2019	72,99
2010	67,83	2020	72,93
2011	68,31	2021	73,30
2012	69,04	2022	73,81
2013	69,49		

Berdasarkan pada data tabel di atas IPM di Sulawesi Utara selalu mengalami peningkatan. Akan tetapi pada tahun 2010 mengalami penurunan, peningkatan IPM tertinggi pada tahun 2006 yaitu sebesar 74,4%. Pembangunan manusia di Indonesia khususnya di Sulawesi Utara semakin meningkat dari tahun ke tahun. Sulawesi Utara merupakan provinsi pertama di Indonesia Timur (Sulawesi, Maluku, Papua) yang berada pada level Indeks pembangunan manusia tinggi. Capaian pembangunan di kota lebih tinggi dibandingkan dengan di kabupaten. Hal ini bukan hanya menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah Provinsi Sulawesi Utara namun semua pihak harus turut andil untuk memperkecil kesenjangan Indeks pembangunan manusia antarwilayah. Salah satu upaya dalam memperkecil kesenjangan pembangunan manusia antar wilayah adalah dengan pembangunan infrastruktur. Infrastruktur akan memberikan kemudahan dalam mengakses fasilitas kesehatan dan pendidikan. Dengan adanya infrastruktur yang memadai juga akan menggenjot aktivitas ekonomi di wilayah tersebut. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya pembangunan Manusia

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi indeks pembangunan manusia antara lain produk domestik regional bruto, jumlah penduduk dan kemiskinan. Indikator penting untuk dapat mengetahui kondisi ekonomi suatu daerah dalam kurun waktu tertentu ialah menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dapat menggunakan atas dasar harga berlaku ataupun atas dasar harga konstan. Menurut Sukirno (2000), pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan output per kapita dalam jangka yang panjang, penekanannya ialah pada tiga aspek yakni proses, output perkapita, serta jangka panjang. Penelitian Bakhti (2012) menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. Penduduk adalah orang dalam matryanya sebagai pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, warga negara dan himpunan kuantitas yang bertempat tinggal di suatu tempat dalam batas wilayah tertentu (Mantra, 2009). Pertumbuhan penduduk adalah merupakan keseimbangan yang dinamis antara kekuatan-kekuatan yang menambah dan mengurangi jumlah penduduk. Pertumbuhan penduduk diakibatkan oleh beberapa komponen yaitu: kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas), migrasi masuk dan migrasi keluar. Penelitian sangkereng, Engka dan Sumual (2019) menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Kemampuan pendapatan yang rendah ini juga akan berdampak berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan. Penelitian Tarumingken, Rumat dan Rotinsulu (2018) menunjukkan bahwa kemiskinan berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia.

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pasal 1 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 3 menyatakan bahwa PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan Desentralisasi. PAD atau disingkat sebagai Pendapatan Asli Daerah, merupakan penerimaan yang berasal dari sumber-sumber di dalam wilayah suatu daerah tertentu, dan dipungut berdasarkan Undang-undang yang berlaku di Indonesia yaitu Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Menurut Abdul Halim (2004:94), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.

Sesuai dengan UU No. 33 Tahun 2004, dalam pelaksanaan otonomi daerah pemerintah daerah memiliki sumber-sumber pendanaan pelaksanaan pemerintah daerah yang terdiri atas: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), 2) Dana Perimbangan, 3) Pinjaman Daerah, 4) Lain-lain penerimaan yang sah. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki kaitan logis dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) karena PAD mencerminkan sebagian dari sumber daya ekonomi suatu daerah. Jika PAD meningkat, pemerintah daerah memiliki potensi lebih besar untuk mengalokasikan anggaran pada sektor-sektor kunci seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, yang dapat meningkatkan IPM. Namun, keterkaitan ini juga tergantung pada kebijakan pemerintah daerah dalam mengelola PAD untuk memajukan aspek-aspek pembangunan manusia. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh oleh suatu daerah dari sumber-sumber di dalam wilayahnya sendiri. Indeks Pembangunan Manusia (IPM), di sisi lain, mengukur tingkat pembangunan manusia dengan memperhatikan faktor-faktor seperti harapan hidup, pendidikan, dan pendapatan. Kedua indikator ini berperan penting dalam menggambarkan kesejahteraan dan perkembangan suatu daerah.

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
2004	147.139.838	73,4
2005	198.270.258	74,2
2006	211.236.498	74,4
2007	252.324.235	72,00
2008	322.580.793	72,1
2009	331.083.668	72,5
2010	418.737.661	67,83
2011	535.087.974	68,31
2012	633.650.533	69,04
2013	789.631.755	69,49
2014	937.681.927	69,96
2015	1.012.945.961	70,39
2016	981.044.550	71,05
2017	1.146.674.828	71,66
2018	1.253.804.978	72,20
2019	1.286.006.930	72,99
2020	1.172.932.102	72,93
2021	1.311.932.122	73,30
2022	1.478.527.205.089	73,81

Pada analisis data (PAD), terdapat tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Adanya kesenjangan dan kompleksitas data dalam PAD dapat mempengaruhi akurasi perhitungan IPM, sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam evaluasi tingkat pembangunan suatu daerah. Perlu adanya pendekatan yang lebih efektif dan terstruktur dalam pengelolaan data PAD untuk memastikan keakuratan perhitungan IPM dan memberikan dasar yang kuat bagi kebijakan pembangunan berkelanjutan. Dari penelitian yang dilakukan Putra & Ulupui (2015), Nova Yurista Santi (2019), Dara Estu Satiti (2019) dan Rahmayati & Pertiwi (2018) menyatakan bahwa berpengaruhnya PAD terhadap IPM

dikarenakan PAD banyak lebih banyak digunakan untuk belanja modal maupun belanja rutin yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun hasil penelitian bertentangan dengan peneliti Williantara & Budiasih (2016), Zul Fadhly (2018) Riviando, Agustin & Halmawati (2019) menyatakan bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap IPM yang dikarenakan jumlah PAD yang digunakan dalam mendanai belanja pegawai lebih besar di bandingkan untuk mendanai belanja modal yang sangat jelas lebih berdampak pada peningkatan IPM. Menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, DAU merupakan salah satu pelaksanaan program desentralisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Penyaluran DAU dilaksanakan setiap bulan oleh Kementerian Keuangan kepada pemerintah daerah berdasarkan hasil perhitungan yang ditetapkan dengan ketetapan Presiden. Besaran DAU yang semakin meningkat menunjukkan kinerja keuangan pemerintah daerah yang semakin turun (Harjito et al., 2020). Menurut Nordiawan (2017: 87) Dana Alokasi Umum yaitu: "Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi". Keterkaitan antara Dana Alokasi Umum (DAU) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendanaan Pelayanan Sosial: DAU dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Peningkatan akses dan kualitas layanan ini dapat berkontribusi positif terhadap komponen pendidikan dan kesehatan dalam perhitungan IPM.
2. Reduksi Disparitas Regional: Distribusi DAU yang merata dapat membantu mengurangi disparitas pembangunan antar daerah. Jika dana dialokasikan secara adil, daerah-daerah yang sebelumnya tertinggal dapat memperbaiki indikator IPM mereka, mengurangi kesenjangan antar wilayah.
3. Peningkatan Standar Hidup: Penggunaan DAU untuk proyek infrastruktur dan ekonomi lokal dapat meningkatkan standar hidup penduduk. Aspek ini turut berperan dalam perhitungan IPM, yang mencakup standar hidup sebagai salah satu indikatornya.
4. Pemberdayaan Ekonomi Lokal: DAU yang digunakan untuk pengembangan ekonomi lokal dapat menciptakan peluang pekerjaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Peningkatan ekonomi ini dapat tercermin dalam indikator IPM yang mengukur standar hidup.

Tahun	Dana Alokasi Umum (DAU)	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
2004	220.626.000	73,4
2005	247.873.000	74,2
2006	404.324.000	74,4
2007	447.094.538	72,00
2008	532.916.167	72,1
2009	558.634.931	72,5
2010	558.781.013	67,83
2011	619.711.007	68,31
2012	790.534.491	69,04
2013	885.684.277	69,49
2014	949.852.622	69,96
2015	1.026.948.809	70,39
2016	1.065.545.204	71,05
2017	1.390.272.639	71,66
2018	1.427.544.997	72,20
2019	1.463.436.158	72,99
2020	1.335.813.209	72,93

2021	1.330.463.660	73,30
2022	3.900.000.000	73,81

Mencari cara untuk memastikan adanya DAU apakah Ini telah digunakan dengan sangat efektif untuk meningkatkan indikator. Indikator yang termasuk dalam IPM meliputi pendidikan, kesehatan, dan taraf hidup. Penggunaan dana yang tidak efektif atau tidak tepat dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan manusia dan meningkatkan IPM. Oleh karena itu, penekanan harus diberikan pada pengelolaan dan pemantauan yang tepat untuk memastikan bahwa setiap DAU mempunyai dampak optimal terhadap pembangunan masyarakat. Dana Alokasi Umum (DAU) dalam penelitian yang dilakukan oleh Putra & Ulupui (2015) dan Riviando, Agustin & Halmawati (2019), Nova Yurista Santi (2019), Dara Estu Satiti (2019), dan Lestari, Sarfiah & Prasetyanto (2019) menyatakan bahwa DAU berpengaruh positif signifikan terhadap IPM yang disebabkan pengalokasian DAU difokuskan oleh pemerintah daerah untuk pembangunan manusia. Namun hasil penelitian bertentangan dengan peneliti Williantara & Budiasih (2016) dan Rahmayati & Pertiwi (2018) hasil penelitiannya menyatakan bahwa DAU tidak berpengaruh terhadap IPM, hal tersebut di karenakan DAU merupakan komponen alokasi dasar yang penggunaannya masih untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai di bandingkan untuk belanja modal.

Kajian Teori

Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi-Umum dalam Undang Undang No 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah didefinisikan sebagai dana bersumber dari APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berdasarkan Undang Undang Peraturan Daerah No 23 Tahun 2014, indikator Dana Alokasi Umum yaitu: alokasi dasar dan celah fiskal. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah menjelaskan bahwa DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. DAU suatu Daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal (fiscal gap) suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah (fiscal need) dan potensi daerah (fiscal capacity). Darwanto dan Yustikasari (2007) menyatakan bahwa pemberian DAU kepada pemda merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemda. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan di dalam APBN dari pemerintah pusat ke pemda, dan pemda secara leluasa dapat menggunakan DAU apakah untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat sehingga akan menciptakan hidup yang sehat dan harapan hidup lebih panjang, meningkatkan kualitas pendidikan dan standard kehidupan masyarakat.

Dana alokasi umum adalah pendapatan yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang selanjutnya digunakan dengan tujuan untuk penyeimbangan keuangan daerah untuk mendanai keperluan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi kebijakan Pemerintah No 55 tahun 2005. DAU bersifat Block Grant yang berarti semua alokasi dana yang ditransfer dari pemerintah pusat diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah (Azis, 2014). DAU tersebut nanti akan digunakan dalam mengatasi disequilibrium infrastruktur yang ada pada setiap daerah agar terciptanya pembangunan yang merata. (Dewi & Suputra, 2017). Dari beberapa pendapat dan definisi di atas maka DAU merupakan salah satu pendapatan daerah yang memiliki peran yang cukup

besar dalam mensejahterakan masyarakat pada suatu daerah sehingga akan berdampak pada meningkatnya pembangunan manusia jika pengalokasian DAU tepat sasaran.

Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)/Human Development Index (HDI) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. HDI digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. Jika fasilitas publik dapat terpenuhi maka masyarakat merasa nyaman dan dapat menjalankan usahanya dengan efisien dan efektif sehingga pada akhirnya akan menciptakan hidup yang sehat dan harapan hidup lebih panjang, meningkatkan kualitas pendidikan dan standard kehidupan masyarakat. Pembangunan manusia mempunyai arti yang luas, namun ide dasar dari pembangunan manusia adalah menciptakan pertumbuhan positif dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya dan lingkungan serta perubahan dalam kesejahteraan manusia. Oleh karena itu manusia harus diposisikan sebagai potensi kekayaan bangsa, sehingga pembangunan manusia diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi rakyatnya untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif (Human Development Report, 1990). Konsep ini berbeda jika dibandingkan dengan konsep konsep klasik pembangunan yang memberikan perhatian utama kepada pertumbuhan ekonomi bukan pada pembangunan manusia. Konsep pertumbuhan ekonomi lebih menekankan pada peningkatan produk nasional dari pada memperbaiki kualitas hidup manusia.

Konsep pembangunan sumber daya manusia melihat manusia sebagai alat atau input dari proses produksi, bukan sebagai tujuan akhir. Konsep kesejahteraan melihat manusia sebagai penerima dan bukan sebagai agen dari perubahan dalam proses pembangunan. Sedangkan konsep kebutuhan hanya terfokus pada penyediaan barang dan jasa untuk kelompok masyarakat tertinggal, bukan memperluas pilihan-pilihan bagi masyarakat diberbagai bidang. Sedangkan konsep pembangunan manusia mempunyai cakupan yang lebih luas dari teori konvensional pembangunan ekonomi. Sehingga pembangunan manusia yang dimaksudkan adalah suatu proses memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki oleh manusia. Antara lain yang terpenting adalah pilihan untuk berumur panjang dan sehat, pilihan untuk berilmu, pilihan untuk mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak. Salah satu cara untuk mengukur tingkat kesejahteraan adalah melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar yaitu umur panjang dan sehat (kesehatan), pengetahuan (pendidikan), dan kehidupan yang layak (ekonomi). Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Pendapatan Asli Daerah

alam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pasal 1 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 3 menyatakan bahwa PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada

Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan Desentralisasi. PAD atau disingkat sebagai Pendapatan Asli Daerah, merupakan penerimaan yang berasal dari sumber-sumber di dalam wilayah suatu daerah tertentu, dan dipungut berdasarkan Undang - undang yang berlaku di Indonesia yaitu Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Menurut Abdul Halim (2004:94), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah. Sesuai dengan UU No. 33 Tahun 2004, dalam pelaksanaan otonomi daerah pemerintah daerah memiliki sumber-sumber pendanaan pelaksanaan pemerintah daerah yang terdiri atas: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), 2) Dana Perimbangan, 3) Pinjaman Daerah, 4) Lain-lain penerimaan yang sah. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Dari temuan-temuan yang diuraikan oleh para peneliti terdahulu dapat dilihat bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi pada setiap daerah. Untuk memacu dan memicu dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang baik diperlukan adanya kerjasama, baik itu dari Pemerintah Daerah dan masyarakat itu sendiri. Untuk mengoptimalkan dan mengalokasikan dana anggaran baik dari PAD maupun yang diberikan dari pusat berupa DAU dan DAK dapat digunakan untuk melaksanakan kegiatan otonomi daerah masing-masing. Jika PAD berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi maka besar kemungkinan DAU dan DAK berpengaruh juga terhadap pertumbuhan ekonomi, hal ini pada umumnya nilai dari DAU dan DAK lebih besar dibandingkan dengan kontribusi dari PAD. Maka dengan meningkatkan PAD akan berdampak pada penekanan tingkat pengangguran dan mengurangi kemiskinan.

METODE PENELITIAN

Jenis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2013). Tahapan dalam penelitian ini yaitu

1. Data yang dipilih adalah Data Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Sulawesi Utara tahun 2004-2022
2. Mengambil data dari web/situs resmi yaitu Badan Pusat Statistika (BPS)

Untuk memperoleh data-data yang Diperlukan, maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, antara lain:

1. Data Sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian ini ada adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang dicari oleh peneliti berdasarkan sumber yang sudah tersedia. Data sekunder berwujud berupa data dokumentasi atau data laporan yang sudah ada.
2. Penelitian Kepustakaan. Penelitian kepustakaan merupakan suatu metode yang digunakan dalam penelitian yang bersumber dari literatur, sumber bacaan, tulisan-tulisan ilmiah yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Group Unit Root Test

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey				
F-statistic	0.025699	Prob. F(3,12)		0.9941
Obs*R-squared	0.102139	Prob. Chi-Square(3)		0.9916
Scaled explained SS	0.255507	Prob. Chi-Square(3)		0.9682
Test Equation:				
Dependent Variable: RESID^2				
Method: Least Squares				
Date: 11/22/23 Time: 20:36				
Sample: 2005 2022				
Included observations: 16				
Variable	Coefficien t	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	55134.36	46718.73	1.180134	0.2608
D(DAU)	12.82100	209.7806	0.061116	0.9523
D(IPM)	169.6529	2947.834	0.057552	0.9551
ECT(-1)	-51.39575	209.5672	-0.245247	0.8104
R-squared	0.006384	Mean dependent var		54328.75
Adjusted R-squared	-0.242020	S.D. dependent var		167341.2
S.E. of regression	186495.0	Akaike info criterion		27.32251
Sum squared resid	4.17E+11	Schwarz criterion		27.51566
Log likelihood	-214.5801	Hannan-Quinn criter.		27.33241
F-statistic	0.025699	Durbin-Watson stat		2.110683
Prob(F-statistic)	0.994130			

Hasil uji unit root kelompok menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara variabel-variabel yang diuji. Uji ini dilakukan dengan menggunakan t-statistic Levin, Lin & Chu, Im, Pesaran dan Shin W-stat, ADF – Fisher Chi-square, dan PP – Fisher Chi-square. Hasil pengujian menunjukkan bahwa terdapat unit root pada variabel yang diuji, yang mengindikasikan adanya hubungan jangka panjang antara variabel PAD, DAU, dan IPM. Interpretasi dari hasil uji ini adalah bahwa variabel-variabel yang diuji memiliki hubungan yang signifikan dalam jangka panjang, yang dapat menjadi dasar penting dalam analisis lebih lanjut terkait dengan hubungan antar variabel tersebut.

Persamaan Jangka Panjang

Dependent Variable: PAD				
Method: Least Squares				
Date: 11/22/23 Time: 20:14				
Sample: 2004 2022				
Included observations: 18				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
DAU	0.670553	0.211493	3.170564	0.0063
IPM	-0.096720	5.634147	-0.017167	0.9865
C	88.33680	393.6845	0.224385	0.8255
R-squared	0.404336	Mean dependent var	338.3141	
Adjusted R-squared	0.324915	S.D. dependent var	294.3854	
S.E. of regression	241.8776	Akaike info criterion	13.96575	
Sum squared resid	877571.3	Schwarz criterion	14.11415	
Log likelihood	-122.6918	Hannan-Quinn criter.	13.98621	
F-statistic	5.090999	Durbin-Watson stat	2.041169	
Prob(F-statistic)	0.020536			

Hasil uji persamaan jangka panjang menunjukkan bahwa variabel DAU memiliki hubungan yang signifikan dengan PAD, namun variabel IPM tidak memiliki hubungan yang signifikan. Hal ini terlihat dari nilai koefisien DAU yang positif dan signifikan (0.670553, $p=0.0063$), sementara koefisien IPM negatif dan tidak signifikan (-0.096720, $p=0.9865$).

Ect Unit Root Test

Null Hypothesis: D(ECT,2) has a unit root				
Exogenous: Constant				
Lag Length: 3 (Automatic - based on SIC, maxlag=3)				
			t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic			-9.885271	0.0003
Test critical values:	1% level		-5.119808	
	5% level		-3.519595	
	10% level		-2.898418	
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.				
Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations				
and may not be accurate for a sample size of 6				
Augmented Dickey-Fuller Test Equation				
Dependent Variable: D(ECT,3)				
Method: Least Squares				
Date: 11/22/23 Time: 20:20				
Sample (adjusted): 2010 2022				
Included observations: 6 after adjustments				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
D(ECT(-1),2)	-3.031815	0.306700	-9.885271	0.0642
D(ECT(-1),3)	1.237700	0.245832	5.034736	0.1248
D(ECT(-2),3)	0.629351	0.149496	4.209822	0.1485
D(ECT(-3),3)	0.206657	0.056394	3.664521	0.1696
C	40.91884	26.89744	1.521291	0.3702
R-squared	0.999471	Mean dependent var		285.4432
Adjusted R-squared	0.997355	S.D. dependent var		1222.105
S.E. of regression	62.85171	Akaike info criterion		10.99434
Sum squared resid	3950.338	Schwarz criterion		10.82081
Log likelihood	-27.98302	Hannan-Quinn criter.		10.29967
F-statistic	472.3490	Durbin-Watson stat		0.022638
Prob(F-statistic)	0.034494			

Hasil uji ECT menunjukkan bahwa terdapat unit root pada ECT(-1), yang mengindikasikan adanya hubungan jangka panjang antara variabel PAD, DAU, dan IPM. Pada bagian ECT UNIT ROOT TEST, hasil uji menunjukkan bahwa variabel D(ECT,2) memiliki nilai t-statistik sebesar -9.885271 dengan probabilitas sebesar 0.0642. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat bukti yang cukup untuk menolak hipotesis nol, yang berarti variabel tersebut tidak memiliki unit root. Oleh karena itu, variabel D(ECT,2) dapat dianggap sebagai variabel stasioner dalam model regresi.

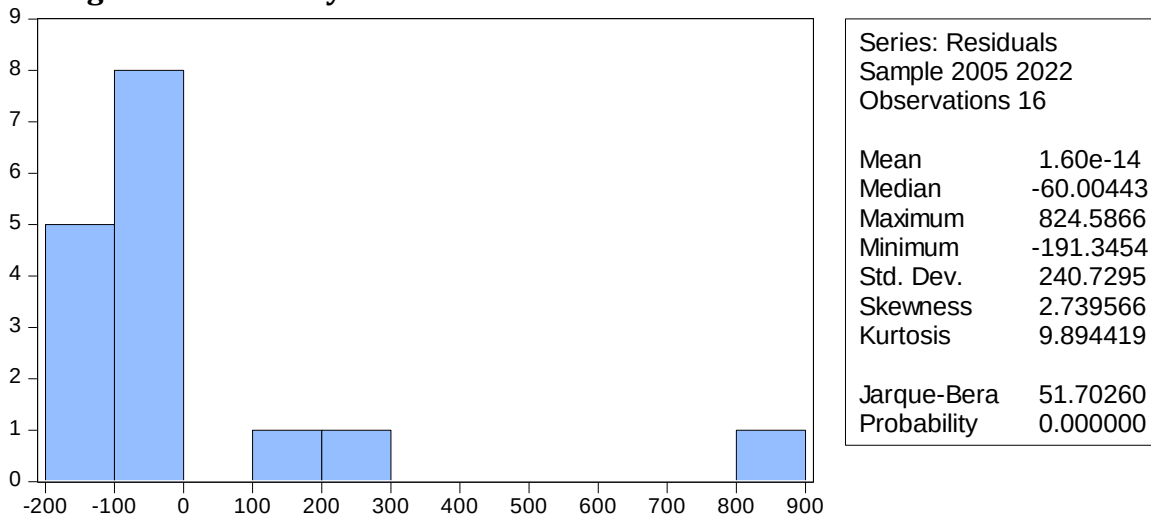
Persamaan Jangka Pendek

Dependent Variable: D(PAD)
Method: Least Squares
Date: 11/22/23 Time: 20:27

Sample (adjusted): 2005 2022				
Included observations: 16 after adjustments				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
D(DAU)	0.642698	0.302749	2.122876	0.0553
D(IPM)	0.119129	4.254221	0.028003	0.9781
ECT(-1)	-0.997585	0.302441	-3.298447	0.0064
C	3.626091	67.42299	0.053781	0.9580
R-squared	0.619643	Mean dependent var		-13.38750
Adjusted R-squared	0.524554	S.D. dependent var		390.3314
S.E. of regression	269.1437	Akaike info criterion		14.24069
Sum squared resid	869260.0	Schwarz criterion		14.43383
Log likelihood	-109.9255	Hannan-Quinn criter.		14.25058
F-statistic	6.516437	Durbin-Watson stat		2.135047
Prob(F-statistic)	0.007286			

Hasil uji persamaan jangka pendek menunjukkan bahwa variabel DAU dan ECT(-1) memiliki hubungan yang signifikan dengan perubahan PAD, namun variabel IPM tidak signifikan. Hal ini terlihat dari koefisien DAU (0.642698, $p=0.0553$) dan ECT(-1) (-0.997585, $p=0.0064$) yang signifikan, sementara koefisien IPM (0.119129, $p=0.9781$) tidak signifikan.

Histogram - Normality Test



Hasil uji histogram normalitas menunjukkan bahwa distribusi residu dari model tidak sepenuhnya mengikuti distribusi normal.

Ramsey - Reset Test

Dependent Variable: D(PAD)				
Method: Least Squares				
Date: 11/22/23 Time: 20:27				
Sample (adjusted): 2005 2022				
Included observations: 16 after adjustments				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
D(DAU)	0.642698	0.302749	2.122876	0.0553
D(IPM)	0.119129	4.254221	0.028003	0.9781
ECT(-1)	-0.997585	0.302441	-3.298447	0.0064
C	3.626091	67.42299	0.053781	0.9580
R-squared	0.619643	Mean dependent var		-

			13.38750
Adjusted R-squared	0.524554	S.D. dependent var	390.3314
S.E. of regression	269.1437	Akaike info criterion	14.24069
Sum squared resid	869260.0	Schwarz criterion	14.43383
Log likelihood	-109.9255	Hannan-Quinn criter.	14.25058
F-statistic	6.516437	Durbin-Watson stat	2.135047
Prob(F-statistic)	0.007286		

Hasil uji RESET Ramsey menunjukkan adanya potensi masalah spesifikasi model, yang memerlukan perhatian lebih lanjut dalam analisis data. Pada bagian RAMSEY – RESET TEST, terdapat hasil uji yang menunjukkan bahwa nilai F-statistik sebesar 4.086728 dengan probabilitas sebesar 0.0682. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kemungkinan adanya kesalahan spesifikasi model karena probabilitas tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi yang umumnya digunakan (0,05).

Variance Inflation Factors

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey				
F-statistic	0.025699	Prob. F(3,12)		0.9941
Obs*R-squared	0.102139	Prob. Chi-Square(3)		0.9916
Scaled explained SS	0.255507	Prob. Chi-Square(3)		0.9682
Test Equation:				
Dependent Variable: RESID^2				
Method: Least Squares				
Date: 11/22/23 Time: 20:36				
Sample: 2005 2022				
Included observations: 16				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	55134.36	46718.73	1.180134	0.2608
D(DAU)	12.82100	209.7806	0.061116	0.9523
D(IPM)	169.6529	2947.834	0.057552	0.9551
ECT(-1)	-51.39575	209.5672	-0.245247	0.8104
R-squared	0.006384	Mean dependent var		54328.75
Adjusted R-squared	-0.242020	S.D. dependent var		167341.2
S.E. of regression	186495.0	Akaike info criterion		27.32251
Sum squared resid	4.17E+11	Schwarz criterion		27.51566
Log likelihood	-214.5801	Hannan-Quinn criter.		27.33241
F-statistic	0.025699	Durbin-Watson stat		2.110683
Prob(F-statistic)	0.994130			

Hasil uji faktor inflasi varians menunjukkan adanya potensi masalah. Pada bagian VARIANCE INFLATION FACTORS, terdapat nilai Variance Inflation Factors (VIF) untuk setiap variabel independen dalam model regresi. VIF mengukur seberapa besar multicollinearity antara variabel independen. Semakin tinggi nilai VIF, semakin besar kemungkinan adanya multicollinearity. Dalam contoh ini, variabel D(IPM) memiliki VIF sebesar 1.000534, yang menunjukkan bahwa tidak ada masalah multicollinearity dengan variabel tersebut. Namun, variabel lain seperti D(DAU) memiliki VIF sebesar 1.053956, menunjukkan adanya sedikit multicollinearity. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengecekan lebih lanjut terhadap multicollinearity dalam model regresi.

Heterokedasticity Test

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey			
F-statistic	0.025699	Prob. F(3,12)	0.9941

Obs*R-squared	0.102139	Prob. Chi-Square(3)		0.9916
Scaled explained SS	0.255507	Prob. Chi-Square(3)		0.9682
Test Equation:				
Dependent Variable: RESID^2				
Method: Least Squares				
Date: 11/22/23 Time: 20:36				
Sample: 2005 2022				
Included observations: 16				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	55134.36	46718.73	1.180134	0.2608
D(DAU)	12.82100	209.7806	0.061116	0.9523
D(IPM)	169.6529	2947.834	0.057552	0.9551
ECT(-1)	-51.39575	209.5672	-0.245247	0.8104
R-squared	0.006384	Mean dependent var		54328.75
Adjusted R-squared	-0.242020	S.D. dependent var		167341.2
S.E. of regression	186495.0	Akaike info criterion		27.32251
Sum squared resid	4.17E+11	Schwarz criterion		27.51566
Log likelihood	-214.5801	Hannan-Quinn criter.		27.33241
F-statistic	0.025699	Durbin-Watson stat		2.110683
Prob(F-statistic)	0.994130			

Heteroskedastisitas dalam model, yang juga perlu diperhatikan dalam analisis lebih lanjut. Pada bagian HETEROSKEDASTICITY TEST, hasil uji Breusch-Pagan-Godfrey menunjukkan nilai F-statistik sebesar 0.025699 dengan probabilitas sebesar 0.9941. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat bukti yang cukup untuk menolak hipotesis nol, yang berarti tidak terdapat heteroskedastisitas dalam model regresi. Oleh karena itu, asumsi heteroskedastisitas dalam model regresi dapat dianggap terpenuhi.

Serial Correlation Lm Test

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey				
F-statistic	0.025699	Prob. F(3,12)		0.9941
Obs*R-squared	0.102139	Prob. Chi-Square(3)		0.9916
Scaled explained SS	0.255507	Prob. Chi-Square(3)		0.9682
Test Equation:				
Dependent Variable: RESID^2				
Method: Least Squares				
Date: 11/22/23 Time: 20:36				
Sample: 2005 2022				
Included observations: 16				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	55134.36	46718.73	1.180134	0.2608
D(DAU)	12.82100	209.7806	0.061116	0.9523
D(IPM)	169.6529	2947.834	0.057552	0.9551
ECT(-1)	-51.39575	209.5672	-0.245247	0.8104
R-squared	0.006384	Mean dependent var		54328.75
Adjusted R-squared	-0.242020	S.D. dependent var		167341.2
S.E. of regression	186495.0	Akaike info criterion		27.32251
Sum squared resid	4.17E+11	Schwarz criterion		27.51566
Log likelihood	-214.5801	Hannan-Quinn criter.		27.33241
F-statistic	0.025699	Durbin-Watson stat		2.110683
Prob(F-statistic)	0.994130			

Hasil uji korelasi serial LM menunjukkan bahwa terdapat masalah autokorelasi pada model. Uji ini dilakukan dengan menggunakan Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test

yang menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0.4504. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kemungkinan adanya autokorelasi pada model residual. Interpretasi dari hasil uji ini adalah bahwa terdapat bukti yang menunjukkan adanya autokorelasi pada model residual, yang dapat mempengaruhi validitas hasil uji statistik dalam model. Oleh karena itu, autokorelasi ini perlu diperhatikan dalam analisis lebih lanjut terkait dengan model yang digunakan. Dari hasil-hasil uji tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara variabel-variabel yang diuji, namun juga terdapat potensi isu-isu seperti spesifikasi model dan heteroskedastisitas yang perlu diperhatikan dan diatasi dalam analisis data lebih lanjut.

PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Provinsi Sumatera Utara. Maksudnya, jika PAD meningkat maka IPM juga meningkat. Perda Kota/Kabupaten sangat mengandalkan PAD ini karena hasilnya bersumber dan dimanfaatkan atau digunakan berdasarkan prioritas daerah yang bersangkutan secara langsung dalam kegiatan pembangunan dan pemerintahannya (Gulo, 2022). Bisa disimpulkan bahwa setiap tahun terjadi peningkatan kegiatan perekonomian dan pembangunan daerah di Kota Sulawesi Utara sehingga sudah seharusnya setiap masyarakatnya bisa merasakan manfaat atau dampak positif dari adanya peningkatan tersebut (Nurhabibah et al, 2022). Variabel PAD mempunyai pengaruh yang besar dalam meningkatkan IPM pada kota Sulawesi Utara. PAD digunakan untuk pemerintah daerah dalam mendanai pembangunan di daerah, yang dapat menunjang kesejahteraan masyarakat, serta pengalokasian PAD untuk pembangunan infrastruktur yang nantinya akan berdampak besar terhadap peningkatan IPM. Besarnya alokasi PAD untuk meningkatkan pembangunan daerah sangat berperan dalam memajukan kesejahteraan masyarakat.

Jika DAU meningkat maka IPM juga meningkat. Hal ini dikarenakan DAU yang diberikan kepada Kota di Sulawesi Utara dari tahun ketahun mengalami peningkatan. DAU yang bersumber dari APBN merupakan contoh nyata pemerintah pusat dalam menerapkan kebijakan desentralisasi (Suryana, 2018). Akan tetapi DAU juga bisa habis hanya untuk menangani permasalahan keuangan yang disebabkan kapasitas fiskal daerah yang rendah atau untuk menggaji para pegawai Perda. DAU memiliki pengaruh yang positif terhadap IPM. DAU bersifat block grant yang berarti pengalokasian DAU sepenuhnya di serahkan kepada pemerintah daerah. DAU mampu memberikan kontribusi terhadap kinerja perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat walaupun dengan kontribusi yang kecil. Tolak ukur dari keberhasilan penggunaan DAU sangat bergantung pada sejauh mana pemerintah daerah dapat mengelola dengan bijak sehingga sesuai dengan skala prioritas kebutuhan dari tiap-tiap daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan manusia pada kota Sulawesi Utara. Pendapatan Asli Daerah di alokasikan untuk belanja modal sangat berperan dalam meningkatkan IPM dan apabila terjadi peningkatan pada Dana Alokasi Umum maka terjadi peningkatan juga terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Berdasarkan simpulan diatas saran yang dapat di rekomendasikan yaitu dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dibutuhkan adanya kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat sehingga mampu meningkatkan perekonomian masyarakat, meningkatkan mutu sumber daya manusia sehingga menimbulkan peningkatan nilai indeks pembangunan manusia diikuti dengan pengalokasian anggaran belanja untuk kepentingan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Karnila Dan Ningsih, Nur Wahyu. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Umum (Dau), Dana Alokasi Khusus (Dak) Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengangguran". Jurnal Manajemen Vol. 15, No. 1 (2021).
- Febriyanto, Herlambang. "Pengaruh Dau, Dak Fisik Dan Pad Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Provinsi Kalimantan Barat". Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi Vol.7, No. 3 (2022).
- Gulo, Heniwati, Fitrawaty Dan Arwansyah. "Analisis Pengaruh Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Sumatera Utara". Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Humaniora Vol. 9, No. 1 (2023) : 59-73.
- Harahap, Riva Ubar. "Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Kab./Kota Propinsi Sumatera Utara". Kitabah Vol. 1, No. 1 (2017).
- Ishak, Jouzar Farouq. "Covid-19: Dampaknya Terhadap Pendapatan Asli Daerah". Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Bandung Vol. 3, No. 1 (2021) : 587-591.
- Lugastoro, Decta Pitron. "Analisis Pengaruh Pad Dan Dana Perimbangan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Di Jawa Timur". Jurnal Ilmiah.
- Melgiana, Anggun Claudia, Rupa, I Wayan Dan Riasning, Ni Putu. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening". Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa Vol. 1, No. 1 (2020) : 45-49.
- Patadang, Tirza Meireny, Rotinsulu, Tri Oldy Dan Rorong, Ita Pingkan Fasnle. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Bagi Hasil (Dbh), Dana Alokasi Umum (Dau), Dan Dana Alokasi Khusus (Dak) Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Minahasa Tenggara Dengan Pengeluaran Di Bidang Kesehatan Sebagai Variabel Intervening". Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah Vol. 2, No. 2 (2021).
- Rinanda, Teja Dan H, Subambang. "Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Melalui Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris Pada Pemerintahan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara)". Jurnal Ekonomi Hukum & Humaniora Vol. 1, No. 1 (2020).
- Riviando, Adel, Agustin, Heri Dan Halmawati. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Pada Kabupaten Dan Kota Di Sumatera Barat Tahun 2015-2017)". Jurnal Eksplorasi Akuntansi Vol. 1, No. 1 (2019) : 1-17.
- Savitri, Agitha Nur Dan Sari, Shinta Permata. "Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan: Tinjauan Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Kabupaten/Kota Di Sulawesi Utara". Business And Economics Conference In Utilization Of Modern Technology (2022).
- Sulastri, Evi Dan Efendri. "Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Umum (Dau), Dana Alokasi Khusus (Dak) Dan Dana Bagi Hasil (Dbh) Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) (Kabupaten/Kota Di Seluruh Provinsi Di Kalimantan Tahun Anggaran 2015-2019)".
- Williantara, Gede Ferdi Dan Budiasih, I Gusti Ayu Nyoman. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Bagi Hasil Pada Indeks Pembangunan Manusia", E-Jurnal Akuntansi Vol 13. No. 3 (2016) : 2044-2070.